

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia melaksanakan kerjasama bilateral dengan Malaysia dengan alasan:

1. Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan tujuan karena *illegal fishing* menjadi ancaman bersama dan menyebabkan kerugian bagi kedua negara.
2. Pelaku *illegal fishing* di perairan Indonesia sebagian besar adalah nelayan negara asing, termasuk Malaysia. Jadi dengan kerjasama tersebut, diharapkan negara Malaysia dapat menekan nelayannya untuk melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia demi keberlanjutan kerjasama kedua negara.
3. Dalam kasus *illegal fishing* di perbatasan Indonesia-Malaysia, kedua negara perlu melangsungkan kerjasama untuk menghindari kesalahpahaman penangkapan nelayan yang diduga melakukan tindak *illegal fishing* karena belum ada perjanjian yang jelas yang mengatur batas perairan kedua negara, sehingga masih banyak nelayan yang belum sadar jika sudah melewati batas negaranya.

B. Saran

1. Dalam memerangi *illegal fishing* di perairan Indonesia, sebaiknya perlu koordinasi yang lebih baik oleh semua aktor yang bertanggung jawab mengamankan perairan Indonesia, seperti: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang

Kemaritiman, serta Pengadilan Perikanan. Selain itu, perlu mengikutsertakan nelayan lokal dalam pengawasan kegiatan perikanan di daerahnya.

2. Pemerintah perlu menambah anggaran dana yang diperlukan dalam patroli perairan oleh pihak keamanan, yang selama ini masih terkendala mengenai peralatan dan biaya operasional. Selain itu, perlu penambahan SDM dalam pengawasan dan peradilan perikanan.
3. Pemerintah perlu menetapkan batas laut teritorial maupun ZEE dengan perjanjian yang jelas dengan negara tetangga, khususnya Malaysia sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman antara pihak keamanan Indonesia dan Malaysia yang dapat merusak hubungan bilateral kedua negara.

